

The Influence of Clarity Budget Targets, Budget Accuracy on Performance Accountability of Government Agency Through the Internal Control System as an Intervening Variable

Sri Karnila¹, Tenriwaru², Baso Amang
Faculty Business and Economics, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Abstract: This research was conducted with the aim of analyzing how much influence clarity of budget targets, budget accuracy has on the accountability of government agency performance through the internal control system as an intervening variable in the public works department and spatial planning of West Sulawesi province. This research uses a quantitative type of research with a descriptive analysis approach. The population in this study was 141 employees at the Department of Public Works and Spatial Planning in West Sulawesi province. The respondents used were employees in charge of preparing financial reports for each field so that the sample in this study was 45 respondents.

The data collection technique used was a questionnaire using a Likert scale. The data analysis technique used in this research uses the Structure Equation Model (SEM) method based on Partial Least Square (PLS). The results of this research show: clarity of budget targets, budget accuracy and internal control systems influence the accountability of government agency performance. clarity of budget targets, budget accuracy affects the internal control system. Internal control as an intervening variable can influence the clarity of budget targets and budget accuracy on performance accountability.

Keywords: Clarity of Budget Targets, Budget Accuracy, Government Agencies Performance Accountability, Internal Control System

Article Info:

Received: January 27th, 2024 | Revised: March 17th, 2024 | Accepted: May 05th, 2024

DOI: 10.35129/simak.v22i01.503

¹ Email: srikarnila16@gmail.com

² Email: tenriwaru.tenriwaru@umi.ac.id

Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Ketepatan Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Melalui Sistem Pengendalian Internal Sebagai Variabel Intervening

Sri Karnila, Tenriwaru, Baso Amang
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Abstrak: Penelitian ini dilakukan dengan bertujuan untuk menganalisis seberapa besar pengaruh kejelasan sasaran anggaran, ketepatan anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melalui sistem pengendalian internal sebagai variabel intervening pada dinas pekerjaan umum dan penataan ruang provinsi sulawesi barat. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Populasi dalam penelitian ini yaitu pegawai pada Dinas PU dan penataan ruang provinsi Sulawesi barat berjumlah 141 pegawai. Responden yang digunakan adalah pegawai yang bertugas dalam menyusun laporan keuangan setiap bidang sehingga sampel dalam penelitian ini adalah berjumlah 45 responden.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner dengan menggunakan skala likert. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode *Structure Equation Model* (SEM) berbasis *Partial Least Square* (PLS). Hasil penelitian ini menunjukkan: kejelasan sasaran anggaran, ketepatan anggaran dan sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. kejelasan sasaran anggaran, ketepatan anggaran berpengaruh terhadap sistem pengendalian internal. Pengendalian internal sebagai variabel intervening dapat mempengaruhi kejelasan sasaran anggaran dan ketepatan anggaran terhadap akuntabilitas kinerja.

Kata kunci: Kejelasan Sasaran Anggaran, Ketepatan Anggaran, Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Sistem Pengendalian Internal

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kejelasan sasaran anggaran akan menggambarkan seberapa luasnya sasaran anggaran yang dinyatakan secara jelas dan spesifik dan dimengerti oleh pihak yang bertanggung jawab terhadap pencapaian target tersebut. Sedangkan Ketidakjelasan sasaran anggaran akan menyebabkan pelaksana anggaran tidak puas dalam bekerja.

Tidak tepatnya penganggaran yang ditujukan untuk suatu kegiatan intansi pemerintah daerah menyebabkan banyaknya temuan kesalahan dalam hasil pemeriksaan laporan keuangannya. Tercapainya keefektifan, keefisienan dan ekonomisnya penggunaan anggaran tersebut merupakan prestasi pemerintah daerah yang berkompeten dan dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja. Terjadi kesenjangan anggaran (*budgetary slack*) yang tinggi pada pengelolaan anggaran Pemerintah Kabupaten Wajo, ini disebabkan adanya partisipasi anggaran yaitu bawahan mempunyai partisipasi cukup tinggi dalam penyusunan anggaran, penekanan anggaran yang berarti adanya tekanan yang dirasakan oleh bawahan atas target anggaran yang ditetapkan, dimana target anggaran tersebut dijadikan tolak ukur atas kinerja bawahan (Tenriwaru, T. 2015).

Berdasarkan hasil Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan aspek, fokus dan indikator kinerja menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan. Didapatkan hasil bahwa Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap (Baik dan Sedang) Pada Renstra Pokok 2017-2022, telah ditargetkan jalan provinsi dalam kondisi Mantap pada akhir tahun 2018 sebesar 44,95%, akan tetapi yang tercapai sampai dengan akhir tahun 2018 hanya sebesar 35,33%. Hal ini disebabkan keterbatasan anggaran baik yang bersumber dari transfer pusat maupun Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini menjadi permasalahan pokok dalam pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Barat. Masih rendahnya persentase jalan provinsi dalam kondisi baik dan sedang (Mantap) serta belum terpenuhinya standar jalan pada sebagian besar jalan provinsi menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penilaian indikator kinerja.

Perlunya pengendalian intern di seluruh kegiatan pemerintahan menjadikan adanya sebuah sistem pengendalian intern yang dibuat menjadi Peraturan Pemerintah yaitu Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Lemahnya pengendalian internal dalam suatu organisasi pemerintah juga menyebabkan terjadinya sebuah kecurangan, hal ini terjadi karena lemahnya pengawasan atas kinerja bawahan dalam melaksanakan tugas administrasi.

Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan BPK perwakilan provinsi Sulawesi barat nomor 14.A/LHP/XIX.MAM/05/2022 tanggal 23 Mei 2022 yang dimuat dalam resume hasil pemeriksaan atas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, ditemukan Kekurangan volume lima paket pekerjaan pada dinas pendidikan dan kebudayaan dan dinas pekerjaan umum dan penataan ruang senilai Rp.185.154.398,21 dan sebanyak 11 paket pekerjaan pada dinas pekerjaan umum dan penataan ruang belum dikenakan denda keterlambatan senilai Rp.3.207.840.183,82 dan denda minimal senilai Rp.866.217.972,21. Dengan adanya temuan itu BPK mengintruksikan agar menarik kekurangan denda keterlambatan atas peningkatan jalan dan menyetorkannya ke kas daerah. Dari permasalahan ini tentunya dibutuhkan sebuah pengendalian internal pemerintahan yang lebih efektif dan efisien sehingga kesalahan seperti ini tidak akan terulang Kembali.

Berdasarkan fenomena yang dijelaskan di atas, maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul tentang “Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Ketepatan Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Melalui Sistem Pengendalian Internal Sebagai Variabel Intervening.”

2. TINJAUAN PUSTAKA

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori Agency ialah keterkaitan dua pihak dalam suatu kegiatan transaksi. Pihak yang satu acap dikenal sebagai agent, yakni pihak yang memperoleh wewenang guna melaksanakan kegiatan tertentu yang terawasi oleh pihak lain: principal. Principal ialah pihak yang memberi wewenang bagi agen guna bertindak dan mengawasi tindakan agent. Pihak yang bertransaksi dengan agent dikena sebagai third party. Terkait permasalahan keagenan, praktik dalam melaporkan keuangan di suatu organisasi bidang publik ialah konsep yang berdasar pada teori keagenan (Budi Santoso, 2015).

Kejelasan Sasaran Anggaran

Kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran tersebut (Urip Santoso, 2008). Kejelasan sasaran anggaran menggambarkan luasnya sasaran anggaran yang dinyatakan secara jelas, spesifik dan dimengerti oleh pihak yang bertanggungjawab terhadap pencapaiannya.

Adanya kejelasan sasaran anggaran secara spesifik akan mempermudah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas organisasi sehingga mendorong pegawai untuk melakukan yang terbaik dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya (Paramitha & Gayatri, 2016). Kejelasan sasaran akan membantu pegawai untuk mencapai kinerja yang diharapkan, dimana dengan mengetahui sasaran anggaran tingkat kinerja dapat tercapai. Keterlibatan individu akan memahami sasaran yang akan dicapai oleh anggaran tersebut, serta bagaimana akan mencapainya dengan menggunakan sumber yang ada, selanjutnya target-target anggaran yang disusun akan sesuai dengan yang akan dicapai.

Ketepatan Anggaran

Pratiwy (2013) menjelaskan bahwa ketepatan sasaran anggaran dalam sistem pemerintahan daerah merupakan hal yang sangat diperlukan untuk mengetahui kinerja yang terjadi di lapangan apakah tepat pada sasaran pembangunan dan perkembangan masyarakat. Ketepatan sasaran anggaran pada pemerintah daerah akan memberikan implikasi terhadap kinerja aparatur daerah yang lebih baik, maka hasil akhir dari kinerja sendiri merupakan hasil akhir (*output*) organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi.

Seperti yang di bahas di atas bahwa ketetapan sasaran anggaran belum banyak yang meneliti di dibandingkan dengan kejelasan sasaran anggaran. Dapat di simpulkan bahwa ketepatan dan kejelasan sasaran anggaran saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan karena untuk mengetahui apakah sasaran itu tepat maka harus jelas arah dan tujuan yang diinginkan dalam suatu organisasi. Indikator pengukuran dalam ketepatan sasaran anggaran yaitu adanya tujuan, kinerja, standar, jangka waktu, sasaran prioritas, tingkat kesulitan dan koordinasi.

Akuntabilitas Kinerja Instans Pemerintah

Menurut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ialah suatu perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah agar mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan visi, misi dan tujuan organisasi dalam mencapai tujuantujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Menurut LAN & BPKP tahun 2000 Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban agar akuntabilitas kinerja efektif. Ada tiga indikator yang diperlukan: (1) Ekonomis dan Efisiensi, (2) Efektivitas, (3) Outcome.

Sistem Pengendalian Internal

Hakim (2016) mengatakan bahwa Sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.

(Darmawan, 2016) berpendapat bahwa sistem pengendalian intern terdiri atas kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan kepastian yang layak terhadap manajemen bahwa organisasi telah mencapai tujuan dan sasarnya. Kebijakan dan prosedur iniseringkali disebut pengendalian dan secara kolektif membentuk pengendalian entitas tersebut. jadi, dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian intern merupakan kumpulankumpulan dari bagian bagian yang tidak terpisahyang dijalankan oleh semua pihak yang ada di dalam organisasi tersebut sehingga tujuan akhir yang ditetapkan bersama berjalan efektif dan efisien.

Hipotesis

Hipotesis adalah dugaan sementara yang dianggap besar kemungkinannya untuk menjadi jawaban yang benar dari sisi lain dapat pula dikatakan bahwa hipotesis dalam penelitian ini merupakan jawaban sementara:

Kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas sesuai dengan tujuan dan spesifik agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggung jawab atas pencapaian anggaran tersebut. Penelitian menurut Khairunyah (2018) menyatakan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dari uraian di atas maka, hipotesis pada penelitian ini adalah:

H1: Diduga bahwa kejelasan sasaran anggaran memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada dinas pekerjaan umum dan penataan ruang provinsi sulawesi barat. Penelitian yang dilakukan oleh Pratiwy (2013) menjelaskan bahwa ketepatan sasaran anggaran dalam suatu pemerintahan daerah merupakan hal yang sangat diperlukan untuk mengetahui kinerja yang terjadi di lapangan apakah tepat pada sasaran pembangunan dan perkembangan masyarakat.

Kemudian hasil penelitian yang dilontarkan Dewi (2015) bahwa ketepatan anggaran dan pengendalian manajerial sektor publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja SKPD. Hal ini dapat dilihat bahwa semakin baik ketepatan anggaran dan pengendalian manajerial sektor publik, maka semakin baik akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Dari uraian di atas maka, hipotesis pada penelitian ini adalah:

H2: Diduga ketepatan anggaran memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada dinas pekerjaan umum dan penataan ruang provinsi sulawesi barat. Adanya sistem pengendalian intern yang baik juga dapat mengatasi tingkat kecurangan (fraud) dari karyawan serta diharapkan sistem pengendalian intern dapat mengendalikan proses penganggaran sesuai dengan sasaran anggaran yang telah ditetapkan (Ramandei, 2009). Oleh karena itu, adanya sasaran anggaran yang jelas diperkirakan dapat mempengaruhi sistem pengendalian intern karena adanya sasaran anggaran yang jelas dapat memberikan dasar bagi para manajer untuk mengukur efisiensi, mengidentifikasi masalah, dan mengontrol biaya sehingga para manajer dapat mengambil keputusan yang mengarah kepada tujuan organisasi dan meningkatkan sistem pengendalian intern. Kaltsum & Rohman (2014) melalui hasil kajiannya memperlihatkan bila kejelasan target anggaran pun memengaruhi bermakna bagi pengendalian internal. Berdasarkan uraian di atas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3: Diduga kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap sistem pengendalian internal pada dinas pekerjaan umum dan penataan ruang provinsi sulawesi barat. Sistem pengendalian intern diharapkan dapat memberi keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (Kaltsum dan Rohman, 2014). Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H4: Diduga ketepatan anggaran berpengaruh terhadap sistem pengendalian internal. Dari teori COSO mengemukakan salah satu komponen dari sistem pengendalian internal adalah adanya informasi dan komunikasi sebagai perwujudan dari suatu pertanggungjawaban atas pengendalian internal. Melalui terwujudnya sistem pengendalian internal yang baik pada lingkungan pemerintah yang bertanggungjawab maka akan meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebaliknya jika kualitas sistem pengendalian internal pada lingkungan pemerintah kurang baik maka akan mempengaruhi dalam penilaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hasil penelitian dari Risky Soleman (2019) menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H5: Diduga sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada dinas pekerjaan umum dan penataan ruang provinsi sulawesi barat. Adanya sasaran anggaran yang jelas, maka akan mempermudah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas organisasi dalam rangka untuk mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini berimplikasi pada peningkatan akuntabilitas kinerja. Namun, ketidakkonsistenan atas hasil temuan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pengaruh langsung kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja manajerial maupun akuntabilitas kinerja instansi pemerintah memungkinkan adanya variabel perantara yang memediasi hubungan kejelasan sasaran anggaran dengan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hasil penelitian Sanusi, Atma hayat & Novika Rosari (2022) menyatakan bahwa Pengendalian internal menjadi perantara pengaruh kejelasan sasaran anggaran memengaruhi bermakna bagi akuntabilitas kinerja pada SKPD Pemerintah Kabupaten Kotabaru.

H6: Diduga kejelasan anggaran memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melalui sistem pengendalian internal sebagai variabel intervening pada dinas pekerjaan umum dan penataan ruang provinsi sulawesi barat. Penelitian Dewi (2015) menjelaskan pengendalian yang dilakukan harus efektif dan efisien agar peningkatan pencapaian kendali manajerial pada setiap bagian yang terdapat disetiap dinas dan badan dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja SKPD Kota Denpasar. Seperti yang sudah dijelaskan bahwa semakin baik ketepatan anggaran dan pengendalian manajerial sektor publik, maka semakin baik akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Dari uraian di atas maka, hipotesis pada penelitian ini adalah:

H7: Diduga ketepatan anggaran memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melalui sistem pengendalian internal sebagai variabel intervening pada dinas pekerjaan umum dan penataan ruang provinsi sulawesi barat.

3. METODE PENELITIAN

Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan analisis deskriptif dengan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Data kuantitatif merupakan data yang diperoleh dalam bentuk angka-angka untuk diolah yang berasal dari hasil kuesioner.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah suatu metode yang digunakan untuk mengolah hasil penelitian digunakan memperoleh suatu kesimpulan. Dengan melihat kerangka konseptual, dapat dinyatakan bahwa Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif, dengan menggunakan model SEM (*Structure Equation Model*). SEM dapat dideskripsikan sebagai suatu analisis yang menggabungkan pendekatan analisis faktor (*factor analysis*), Model Struktural, dan analisis jalur (*path analysis*) (Sugiyono, 2007). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode *Structure Equation Model* (SEM) berbasis Partial Least Square (PLS) yang bertujuan untuk melakukan analisis jalur (*path*) dengan variabel laten. Alat bantu yang digunakan adalah software SmartPls ver. 3.0. *for windows*.

Menurut (Widarjono, 2015) analisis jalur di dalam PLS SEM menjelaskan hubungan antara variabel laten dan indikator didalam outer model. PLS SEM bertujuan untuk meminimalkan perbedaan antara nilai prediktif dan aktual dari variabel dependen. estimasi parameter yang didapat dengan Partial Least Square (PLS) dapat dikategorikan sebagai berikut:

- a. kategori pertama, adalah weigh estimate yang digunakan untuk menciptakan skor variabel laten.
- b. kategori kedua, mencerminkan estimasi jalur (*path estimate*) yang menghubungkan variabel laten dan antar variabel laten dan blok indikatornya (*loading*).
- c. kategori ketiga adalah berkaitan dengan means dan lokasi parameter (nilai konstanta regresi) untuk indikator dan variabel laten.

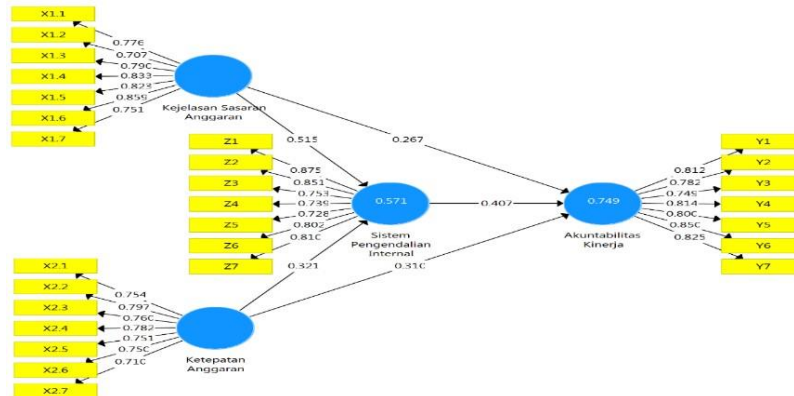
4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada Dinas Pekerjaan Umum dan penataan Ruang Provinsi Sulawesi Barat terhadap 45 orang responden, pada saat melakukan pengumpulan data kembali peneliti hanya memperoleh data sebanyak 40 orang responden.

Analisis Data Model Pengukuran (Outer Model)

Analisis outer model adalah analisis yang digunakan untuk melihat hubungan antar variabel dengan indikator-indikatornya. Analisis model pengukuran (Outer Model) bertujuan untuk mengevaluasi variabel konstruk yang diteliti, validitas (ketepatan), dan reliabilitas (kehandalan) dari suatu variabel.

Pengujian hipotesis pada kajian ini mempergunakan analisis PLS berprogram smartPLS 3.0, dan berskema sesuai uraian berikut.



Gambar 1. Kerangka Penelitian

Uji Validitas

Uji validitas konstruk terdiri dari 2 bagian yaitu, *convergent validity* dan *discriminant validity*.

- Convergent validity*, guna melakukan pengujian terhadap convergent validity maka mempergunakan nilai outer loading atau loading factor. Indikator ternyata sesuai dengan convergent validity berkategori baik jika nilai outer loading lebih dari 0,7. Ghozali, (2014) menuturkan bila nilai outer loading di kisaran 0,5 sd 0,6 terasumsikan memenuhi persyaratan convergent validity.

Tabel 1. Outer Loading

	Outer Loadings	Keterangan
X1.1	0,776	Valid
X1.2	0,707	Valid
X1.3	0,790	Valid
X1.4	0,833	Valid
X1.5	0,823	Valid
X1.6	0,859	Valid
X1.7	0,751	Valid
X2.1	0,754	Valid
X2.2	0,797	Valid
X2.3	0,760	Valid
X2.4	0,782	Valid
X2.5	0,751	Valid
X2.6	0,750	Valid
X2.7	0,710	Valid
Y1	0,812	Valid

Y2	0,782	Valid
Y3	0,749	Valid
Y4	0,814	Valid
Y5	0,800	Valid
Y6	0,850	Valid
Y7	0,825	Valid
Z1	0,875	Valid
Z2	0,851	Valid
Z3	0,753	Valid
Z4	0,739	Valid
Z5	0,728	Valid
Z6	0,802	Valid
Z7	0,810	Valid

Sumber: Hasil pengolahan data peneliti (2024)

Berdasarkan pada tabel 1 dapat dilihat bahwa semua loading factor memiliki nilai diatas 0,7 sehingga konstruk untuk semua variabel sudah baik.

Nilai AVE

Tabel 2. Hasil Nilai Average Variance Extracted (AVE)

	Average Variance Extracted (AVE)
Kejelasan Sasaran Anggaran	0,629
Ketepatan Anggaran	0,575
Akuntabilitas Kinerja	0,648
Sistem Pengendalian Internal	0,633

Sumber: Hasil pengolahan data peneliti (2024)

Berdasarkan tabel 2 dapat dilihat bahwa nilai AVE untuk semua variabel berada di atas 0,5. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variabel memenuhi validitas konvergen karena memiliki nilai loading factor $> 0,7$ dan nilai AVE $> 0,5$.

b. Discriminant validity

Pada tahap discriminant validity terdapat 2 metode yaitu, membandingkan nilai cross loading setiap konstruk dengan korelasi antara konstruk dengan konstruk lainnya dalam model. Kedua, hasil former lacker menunjukkan bahwa angka dari AVE pada konstruk harus lebih tinggi disbanding korelasi konstruk dengan variabel laten lainnya pada model discriminant validity (Hair, 2014).

Tabel 3. Cross Loading

	Kejelasan Sasaran Anggaran	Ketepatan Anggaran	Akuntabilitas Kinerja	Sistem Pengendalian Internal
X1.1	0,776	0,543	0,611	0,471
X1.2	0,707	0,337	0,578	0,486
X1.3	0,790	0,430	0,503	0,543
X1.4	0,833	0,454	0,609	0,722
X1.5	0,823	0,464	0,563	0,481
X1.6	0,859	0,444	0,577	0,595
X1.7	0,751	0,691	0,676	0,600
X2.1	0,571	0,754	0,658	0,499
X2.2	0,554	0,797	0,567	0,527
X2.3	0,333	0,760	0,578	0,409
X2.4	0,512	0,782	0,598	0,547
X2.5	0,360	0,751	0,440	0,490
X2.6	0,417	0,750	0,457	0,414
X2.7	0,457	0,710	0,546	0,467
Y1	0,576	0,577	0,812	0,555
Y2	0,628	0,595	0,782	0,678
Y3	0,457	0,523	0,749	0,541
Y4	0,624	0,584	0,814	0,641
Y5	0,618	0,414	0,800	0,682
Y6	0,640	0,698	0,850	0,673
Y7	0,638	0,702	0,825	0,685
Z1	0,730	0,693	0,806	0,875
Z2	0,692	0,488	0,762	0,851
Z3	0,426	0,517	0,557	0,753
Z4	0,436	0,485	0,479	0,739
Z5	0,490	0,534	0,583	0,728
Z6	0,535	0,330	0,556	0,802
Z7	0,559	0,440	0,581	0,810

Sumber: Hasil pengolahan data peneliti (2024)

Berdasarkan tabel 3 dapat dilihat bahwa nilai loading factor untuk setiap indikator dari masing-masing variabel laten memiliki nilai loading factor dari konstruk yang dituju lebih besar dibandingkan nilai loading konstruk yang lain jika dihubungkan dengan variabel laten lainnya. Hal ini berarti setiap variabel laten memiliki discriminant validity yang baik karena nilai korelasi indikator terhadap konstruknya lebih tinggi dibandingkan nilai korelasi indikator konstruk lainnya.

Tabel 4. Fornell-Larcker Criterion

	Kejelasan Sasaran Anggaran	Ketepatan Anggaran	Akuntabilitas Kinerja	Sistem Pengendalian Internal
Kejelasan Sasaran Anggaran	0,793			
Ketepatan Anggaran	0,612	0,758		
Akuntabilitas Kinerja	0,746	0,732	0,805	
Sistem Pengendalian Internal	0,711	0,636	0,794	0,796

Sumber: Hasil pengolahan data peneliti (2024)

Berdasarkan hasil pada tabel 4, dapat terlihat semua nilai Fornell-Larcker Criterion tiap konstruk lebih besar dari pada korelasinya dengan variabel lain. Dengan demikian, baik cross loading maupun Fornell-Larcker Criterion menunjukkan bukti bahwa konstruk pada model memiliki discriminant validity.

Uji Reliabilitas

Setelah melakukan pengujian terhadap validitas konstruk, pengujian selanjutnya adalah Uji Reliabilitas konstruk yang diukur dengan 2 kriteria yaitu, Composite Reliability (CR) dan Cronbach's Alpha dan blok indikator yang mengukur konstruk CR yang digunakan untuk menampilkan reliabilitas yang baik. Suatu konstruk dinyatakan reliabel apabila nilai CR dan CA > 0,7 namun apabila pada nilai 0,6 masih bisa diterima (Hair et al, 2013).

Tabel 5. Construct Reliability and Validity

	Cronbach's Alpha	rho_A	Composite Reliability
Kejelasan Sasaran Anggaran	0,901	0,904	0,922
Ketepatan Anggaran	0,877	0,880	0,904
Akuntabilitas Kinerja	0,910	0,913	0,928
Sistem Pengendalian Internal	0,903	0,920	0,923

Sumber: Hasil pengolahan data peneliti (2024)

Berdasarkan tabel 5, terlihat bahwa semua konstruk memiliki nilai Cronbach's Alpha > 0,7, maka dapat dikatakan bahwa semua konstruk tersebut telah reliabel. Menurut Hinton, et al (2014) menyarankan empat poin untuk reliabilitas diantaranya adalah yang mencakup probabilitas yang sangat baik yaitu 0,90 (*excellent*) reliabilitas tinggi 0,90 – 0,90 (*high*), reliabilitas moderat 0,50 – 0,70 (*moderate*), dan reliabilitas rendah < 0,50 (*low reliability*). Sehingga, berdasarkan dari hasil data yang diolah dalam penelitian ini, reliabilitasnya berada di rentan angka >0,80 – 0,90 dapat dinyatakan dalam kategori *high*.

Analisis Model Struktural (Inner Model)

Analisis model structural atau (*Inner Model*) bertujuan untuk menguji hipotesis penelitian. Bagian yang perlu dianalisis dalam model structural yakni, koefisien determinasi (R-Square) dan pengujian hipotesis. Koefisien determinasi (R-Square) bertujuan untuk mengevaluasi keakuratan prediksi suatu model. Dengan kata lain untuk mengevaluasi bagaimana variasi nilai variabel terikat dipengaruhi oleh variasi nilai variabel bebas pada sebuah model jalur. Jika nilai $R^2 = 0,75$ maka model adalah subsatansial (kuat), jika $R^2 = 0.50$ maka model adalah moderate (sedang), jika $R^2 = 0,25$ maka model adalah lemah (Juliandi, 2018).

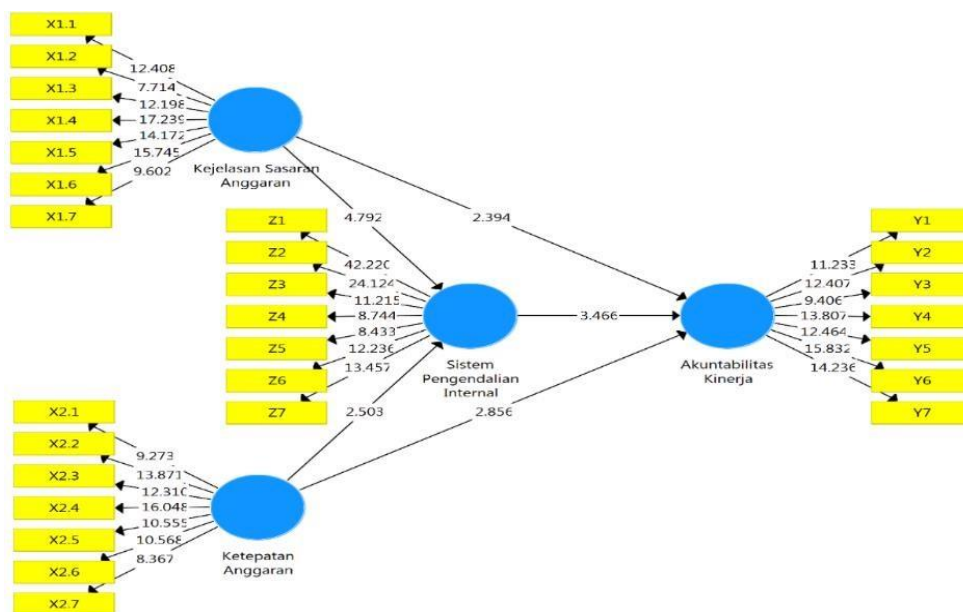
Tabel 6. R Square

	R Square	R Square Adjusted
Akuntabilitas Kinerja	0,749	0,728
Sistem Pengendalian Internal	0,571	0,547

Sumber: Hasil pengolahan data peneliti (2024)

Berdasarkan tabel 6 dapat dijelaskan bahwa, nilai r square untuk variabel akuntabilitas kinerja sebesar 0,749. Hal ini berarti 74,9% variabel kejelasan sasaran anggaran, ketepatan anggaran, dan sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja, sisanya 25,1% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini.

Berdasarkan tabel 6 dapat dijelaskan bahwa, nilai r square untuk variabel sistem pengendalian internal sebesar 0,571. Hal ini berarti 57,1% variabel kejelasan sasaran anggaran dan ketepatan anggaran berpengaruh terhadap sistem pengendalian internal, sisanya 42,9% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini.



Gambar 2. Diagram Path

**Hasil pengujian hipotesis
Pengaruh Langsung (*Direct Effect*)**

Tabel 7. Pengaruh Langsung

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics (O/STDEV)	P Values
Kejelasan Sasaran Anggaran -> Sistem Pengendalian Internal	0,515	0,499	0,107	4,792	0,000
Ketepatan Anggaran -> Sistem Pengendalian Internal	0,321	0,337	0,128	2,503	0,014
Kejelasan Sasaran Anggaran -> Akuntabilitas Kinerja	0,267	0,283	0,112	2,394	0,019
Ketepatan Anggaran -> Akuntabilitas Kinerja	0,310	0,297	0,109	2,856	0,005
Sistem Pengendalian Internal -> Akuntabilitas Kinerja	0,407	0,407	0,117	3,466	0,001

Sumber: Hasil pengolahan data peneliti (2024)

Berdasarkan hasil uji hipotesis untuk pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap sistem pengendalian internal diperoleh nilai t statistik yang lebih besar dari nilai t tabel ($4,792 > 2,029$), dengan tingkat signifikan lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$). Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap sistem pengendalian internal.

Berdasarkan hasil uji hipotesis untuk pengaruh ketepatan anggaran terhadap sistem pengendalian internal diperoleh nilai t statistik yang lebih besar dari nilai t tabel ($2,503 > 2,029$), dengan tingkat signifikan lebih kecil dari 0,05 ($0,014 < 0,05$). Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel ketepatan anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap sistem pengendalian internal.

Berdasarkan hasil uji hipotesis untuk pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja diperoleh nilai t statistik yang lebih besar dari nilai t tabel ($2,394 > 2,029$), dengan tingkat signifikan lebih kecil dari 0,05 ($0,019 < 0,05$). Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja.

Berdasarkan hasil uji hipotesis untuk pengaruh ketepatan anggaran terhadap akuntabilitas kinerja diperoleh nilai t statistik yang lebih besar dari nilai t tabel ($2,856 > 2,029$), dengan tingkat signifikan lebih kecil dari 0,05 ($0,005 < 0,05$). Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel ketepatan anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja.

Berdasarkan hasil uji hipotesis untuk pengaruh sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas kinerja diperoleh nilai t statistik yang lebih besar dari nilai t tabel ($3,466 > 2,029$), dengan tingkat signifikan lebih kecil dari 0,05 ($0,001 < 0,05$). Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja.

Pengaruh Tidak Langsung

Tabel 8. Pengaruh Tidak Langsung

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics (O/STDEV)	P Values
Kejelasan Sasaran Anggaran - > Sistem Pengendalian Internal -> Akuntabilitas Kinerja	0,210	0,203	0,076	2,762	0,007
Ketepatan Anggaran -> Sistem Pengendalian Internal -> Akuntabilitas Kinerja	0,131	0,132	0,056	2,328	0,022

Sumber: Hasil pengolahan data peneliti (2024)

Berdasarkan hasil uji hipotesis untuk pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja melalui sistem pengendalian internal sebagai variabel intervening diperoleh nilai t statistik yang lebih besar dari nilai t tabel ($2,762 > 2,029$), dengan tingkat signifikan lebih kecil dari 0,05 ($0,007 < 0,05$). Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja melalui sistem pengendalian internal sebagai variabel intervening.

Berdasarkan hasil uji hipotesis untuk pengaruh ketepatan anggaran terhadap akuntabilitas kinerja melalui sistem pengendalian internal sebagai variabel intervening diperoleh nilai t statistik yang lebih besar dari nilai t tabel ($2,328 > 2,029$), dengan tingkat signifikan lebih kecil dari 0,05 ($0,022 < 0,05$). Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel ketepatan anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja melalui sistem pengendalian internal sebagai variabel intervening.

Pembahasan

Kejelasan sasaran anggaran memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Hasil penelitian menyatakan bahwa Kejelasan sasaran anggaran memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hal tersebut disebabkan oleh Kejelasan sasaran anggaran dapat membantu pegawai untuk mencapai kinerja yang diharapkan, Dengan adanya sasaran anggaran yang jelas maka akan mempermudah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas organisasi dalam rangka mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya demi tercapainya akuntabilitas kinerja. Pencapaian kinerja ini akan terkait dengan motivasi, dimana hal ini disebabkan dengan motivasi yang tinggi akan membantu pegawai untuk mencapai kinerja yang diharapkan, adanya sasaran anggaran yang jelas, maka akan mempermudah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas organisasi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Sasaran anggaran yang tidak jelas akan menimbulkan ketidak pastian atau keragu-raguan para pelaksana yang mengakibatkan penurunan kinerja dan berarti bahwa akuntabilitas kinerja instansi pemerintah juga akan menurun. Berdasarkan penjabaran tersebut dapat disimpulkan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sanusi, Atma Hayat & Novika Rosari (2022), Harianto, kannedy, zarefar (2021) dan Khairunsyah Yulia efni (2018). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Ketepatan anggaran memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Hasil penelitian menyatakan bahwa Ketepatan anggaran memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hal tersebut disebabkan oleh semakin tepat anggaran yang ditetapkan sebelumnya dengan implementasi anggaran di lapangan maka pertanggungjawaban penggunaan anggaran akan semakin baik dikarenakan sumber daya yang dikeluarkan tetap pada posnya masing-masing sehingga peemborosan anggaran pun dapat diminimalkan yang imbasnya akan meningkatkan akuntabilitas kinerja yang dilakukan oleh pemerintah. Ketepatan anggaran pendapatan dan belanja daerah didefinisikan sebagai slack anggaran yang kecil. Slack anggaran sendiri didefinisikan sebagai perbedaan jumlah anggaran yang disusun oleh pejabat yang berwenang merencanakan anggaran dengan estimasi terbaik yang sebenarnya dapat dicapai. Pemanfaatan sumber daya secara ekonomis, efisien, efektif, adil dan merata dapat tercapai dengan adanya ketepatan anggaran sehingga akuntabilitas pengelolaan asset sumber daya kepada pihak yang berkepentingan akan meningkat. Penelitian ini juga sejalan dengan yang dilakukan oleh Febrian Adhi Pamungkas (2018) Ketepatan Sasaran Anggaran secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja.

Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap sistem pengendalian Internal.

Hasil penelitian menyatakan bahwa Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap sistem pengendalian Internal. Hal tersebut disebabkan oleh Kejelasan sasaran anggaran menunjukkan sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan anggaran dapat dimengerti oleh orang yang bertanggungjawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut. Dengan adanya kejelasan anggaran maka pemangku kepentingan akan lebih mudah dalam melakukan controlling terhadap implementasi anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Semakin jelas kejelasan anggaran maka semakin baik system pengendalian internal dapat berjalan pada instansi pemerintahan. Kejelasan sasaran anggaran merupakan salah satu factor yang dapat menunjang keberhasilan tercapainya tujuan organisasi, kejelasan terhadap pengalokasian anggaran yang diserap oleh setiap institusi akan berdampak berbeda tergantung program kinerja dan output yang dihasilkan dari kinerja pegawai tersebut dalam mengelola anggaran institusinya.

Apabila setiap aparatur institusi sudah memiliki pengetahuan dan wawasan yang jelas terhadap penggunaan anggaran maka output yang dihaikan akan tepat sasaran dan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat dan perkembangan institusi itu sendiri.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu Sanusi, Atma Hayat & Novika Rosari (2022) dan Kaltsum & Rohman (2014) melalui hasil kajiannya memperlihatkan bila kejelasan target anggaran memengaruhi bermakna bagi pengendalian internal.

Ketepatan Anggaran Berpengaruh positif dan signifikan terhadap Sistem Pengendalian Internal.

Hasil penelitian menyatakan bahwa Ketepatan Anggaran Berpengaruh positif dan signifikan terhadap Sistem Pengendalian Internal. Ketepatan anggaran dapat meminimalkan pemborosan anggaran sehingga ketepatan anggaran erat kaitannya dalam mengoptimalkan anggaran dengan melakukan pemangkasan program yang tidak tepat sasaran serta dihapusnya sejumlah kegiatan yang tidak penting, yang tidak mendukung kinerja instansi. Pemerintah memastikan anggaran hanya dipergunakan untuk membiayai program ataupun kegiatan prioritas yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan. Tujuan dari ketepatan anggaran salah satunya adalah system pengendalian Internal yaitu mencegah terjadinya penyelewengan, pemborosan dan penyalahgunaan anggaran. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan semakin baik ketepatan anggaran maka system pengendalian Internal pun berjalan dengan baik.

Sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

Hasil penelitian menyatakan bahwa Sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sistem pengendalian internal dibentuk dengan tujuan untuk meminimalisir terjadinya penyalahgunaan anggaran sehingga semakin baik system pengendalian internal semakin baik pula akuntabilitas pertanggungjawaban pelaksanaan pemerintahan kepada masyarakat karena adanya system yang dapat mengontrol pengelolaan anggaran. sistem pengendalian internal dibentuk dengan tujuan untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien transparan, dan akuntabel, Mengamati, memeriksa ketelitian dan kebenaran pada data akuntansi, memberikan keyakinan yang memadai guna tercapainya efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengamanan kekayaan negara, dan ketaatan pada peraturan perundangundangan. Dengan tercapainya tujuan sistem pengendalian internal, maka pertanggungjawaban atas penyelenggaraan keuangan pemerintah dapat mencapai pada pengelolaan yang efektif dan efisien. Sistem pengendalian internal pada pemerintahan yang baik akan berguna dalam menetapkan lima unsur pengendalian, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan pengendalian internal.

Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Risky Soleman dan dkk (2019) hasil penelitian ini menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Kejelasan anggaran memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melalui sistem pengendalian internal sebagai variabel intervening.

Sasaran anggaran yang jelas akan mempermudah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas organisasi dalam rangka untuk mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini berimplikasi pada peningkatan akuntabilitas kinerja. Namun, ketidakkonsistenan atas hasil temuan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pengaruh langsung kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja manajerial maupun akuntabilitas kinerja instansi pemerintah memungkinkan adanya variabel perantara yang memediasi hubungan kejelasan sasaran anggaran dengan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Kemungkinan adanya variabel perantara tersebut disebabkan oleh faktor-faktor tertentu (situational factors) yang dapat diuji dengan pendekatan kontijensi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Menjelaskan bila pengendalian internal mampu memediasi pengaruh antara kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja Pemerintah Menjelaskan bila pengendalian internal mampu memediasi pengaruh antara kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja Pemerintah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sanusi, Atma Hayat & Novika Rosari (2022) Pengendalian internal menjadi perantara pengaruh kejelasan sasaran anggaran memengaruhi bermakna bagi akuntabilitas kinerja pada SKPD Pemerintah Kabupaten Kotabaru.

Ketepatan anggaran memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melalui sistem pengendalian internal sebagai variabel intervening.

Berdasarkan dari hasil jawaban responden, sebagian besar responden memberikan respon positif dalam pernyataan yang diberikan. Hal tersebut berarti bahwa sistem pengendalian internal telah berjalan secara optimal pada Dinas PU dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Barat.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan dalam penelitian ini, adapun kesimpulan yang dapat diambil sebagai berikut:

Hasil penelitian menyatakan bahwa Kejelasan sasaran anggaran memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hal tersebut disebabkan oleh Kejelasan sasaran anggaran dapat membantu pegawai untuk mencapai kinerja yang diharapkan, Dengan adanya sasaran anggaran yang jelas maka akan mempermudah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas organisasi dalam rangka mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya demi tercapainya akuntabilitas kinerja.

Hasil penelitian menyatakan bahwa Ketepatan anggaran memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hal tersebut disebabkan oleh semakin tepat anggaran yang ditetapkan sebelumnya dengan implementasi anggaran di lapangan maka pertanggungjawaban penggunaan anggaran akan semakin baik dikarenakan sumber daya yang dikeluarkan tetap pada posnya masing-masing sehingga pemborosan anggaran pun dapat diminimalkan yang imbasnya akan meningkatkan akuntabilitas kinerja yang dilakukan oleh pemerintah.

Hasil penelitian menyatakan bahwa Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap sistem pengendalian Internal. Hal tersebut disebabkan oleh Kejelasan sasaran anggaran menunjukkan sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan anggaran dapat dimengerti oleh orang yang bertanggungjawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut. Dengan adanya kejelasan anggaran maka pemangku kepentingan akan lebih mudah dalam melakukan controlling terhadap implementasi anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Hasil penelitian menyatakan bahwa Ketepatan Anggaran Berpengaruh positif dan signifikan terhadap Sistem Pengendalian Internal. Ketepatan anggaran dapat meminimalkan pemborosan anggaran sehingga ketepatan anggaran erat kaitannya dalam mengoptimalkan anggaran dengan melakukan pemangkasan program yang tidak tepat sasaran serta dihapusnya sejumlah kegiatan yang tidak penting, yang tidak mendukung kinerja instansi.

Hasil penelitian menyatakan bahwa Sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sistem pengendalian internal dibentuk dengan tujuan untuk meminimalisir terjadinya penyalahgunaan anggaran sehingga semakin baik system pengendalian internal semakin baik pula akuntabilitas pertanggungjawaban pelaksanaan pemerintahan kepada masyarakat karena adanya system yang dapat mengontrol pengelolaan anggaran.

Hasil penelitian menyatakan bahwa Kejelasan anggaran memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melalui sistem pengendalian internal sebagai variabel intervening Adanya sasaran anggaran yang jelas, maka akan mempermudah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas organisasi dalam rangka untuk mencapai tujuan-tujuan dan sasaransasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini berimplikasi pada peningkatan akuntabilitas kinerja.

Hasil penelitian menyatakan bahwa ketepatan anggaran memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melalui sistem pengendalian internal sebagai variabel intervening

DAFTAR PUSTAKA

Journal/ Books:

- Darmawan, I. G. P. (2016). Pengaruh Efektivitas Sistem Pengendalian Intern terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 19(1), 24-37.
- Dewi, M. A. P., & Supadmi, N. L. (2015). Pengaruh Ketepatan Anggaran Dan Pengendalian Manajerial Sektor Publik Pada Akuntabilitas Kinerja Skpd. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 12(1), 50-63.
- Dewi, M. A. P., & Supadmi, N. L. (2015). Pengaruh Ketepatan Anggaran Dan Pengendalian Manajerial Sektor Publik Pada Akuntabilitas Kinerja SKPD. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 12(1), 50-63.
- Ghozali, I. (2014). *Structural Equation Modeling Alternatif dengan Partial Least Squares (PLS) dilengkapi Software SmartPLS 3.0*.
- Hair, J. F., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2013). *Partial least squares structural equation modeling: Rigorous applications, better results and higher acceptance*. *Long range planning*, 46(1-2), 1-12.
- Hakim, R. (2016). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hinton, P. R. (2014). *Statistics explained*. Routledge.
- Indonesia, P. R. (2008). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- Kaltsum, U., & Rohman, A. (2014). Pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melalui sistem pengendalian intern sebagai variabel intervening (Studi empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Salatiga). *Diponegoro Journal of Accounting*, 3(1), 215-228.
- Khairunsyah, K., & Efni, Y. (2018). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan, Kompetensi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dimediasi Oleh Komitmen Organisasi (Studi Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kampar). *Jurnal Tepak Manajemen Bisnis*, 10(1), 64-78.
- Negara, L. A., Keuangan, B. P., & Pembangunan, R. I. (2000). Akuntabilitas dan good governance, modul 1-5, modul sosialisasi sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). LAN BPKP RI: Jakarta.
- Paramitha, I. A. M. D., & Gayatri. (2016). Pengaruh Ketepatan Sasaran Anggaran, Sistem Pengendalian Manajerial Sektor Publik Dan Sistem Pelaporan Pada Akuntabilitas Kinerja. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 16, 2457–2479.

- Peraturan, P. (2014). Peraturan Presiden (Perpres) nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP). Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 1-44.
- Rahman, A., & Yusuf, M. (2021). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Journal of Management*, 4(2), 257–270. <https://doi.org/10.37531/yume.vxix.334>
- Ramandei, P. (2009). Pengaruh Karakteristik Sasaran Anggaran Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Manajerial Aparat Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Jayapura) (Doctoral dissertation, Diponegoro University).
- Santoso, B. (2015). Keagenan (agency): Prinsip-Prinsip Dasar, Teori, Dan Problematika Hukum Keagenan. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Santoso, U. (2008). Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dalam Mencegah Fraud Urip. *Jurusan Ilmu Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Katolik Parahyangan*, 25(3), 73.
- Sanusi, S., Hayat, A., & Rosari, N. (2022). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja dengan Pengendalian Internal sebagai Variabel Intervening. *Inovatif: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, Bisnis Digital dan Kewirausahaan*, 1(2), 126-148. <https://doi.org/10.55983/inov.v1i2.103>
- Setyawan, H. (2017). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi Dan Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dengan Kinerja Manajerial Sebagai Variabel Moderating. *JOM Fekon*, 4, 251–264.
- Sumartono. (2017). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan (Studi empiris pada pemerintah kota jayapura. *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Ilmu Pemerintahan*, 5(1), 26–43.
- Suwandi, A. P. (2013). Pengaruh kejelasan sasaran anggaran dan desentralisasi terhadap kinerja pemerintah daerah (Studi empiris pada SKPD Pemerintah Kota Padang). *Jurnal Akuntansi*, 1(2).
- Tenriwaru, T. (2015). Pengaruh Partisipasi Anggaran, Asimetri Informasi, dan Penekanan
- Tenriwaru, T. (2015). Pengaruh Partisipasi Anggaran, Asimetri Informasi, dan Penekanan Anggaran terhadap Kesenjangan Anggaran Pemerintah Kabupaten Wajo. *Assets: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 5(1), 129-141.
- Widarjono, A. (2020). Analisis multivariat terapan dengan program SPSS, AMOS, dan SMARTPLS.